

## Peran Komunikasi Antarbudaya dalam Mengatasi Hambatan Sosialisasi Program Pemerintah di Wilayah Multikultural

Putri ayu<sup>1</sup>, Desi Romandani<sup>2</sup>, Afifah Arum Wijayanti<sup>3</sup>

**Abstract:** *Culturally diverse regions face unique challenges in implementing government outreach programs. This study explores how intercultural communication can be an effective solution to address these barriers. The research was conducted through a case study of an inclusive education program in Papua. The results show that a participatory approach and local language adaptation increased the program's acceptance by the local community.*

**Keywords:** *intercultural communication, program outreach, multicultural, government, cultural adaptation.*

**Abstrak:** Wilayah dengan keberagaman budaya menghadapi tantangan unik dalam pelaksanaan program sosialisasi pemerintah. Studi ini mengeksplorasi bagaimana komunikasi antarbudaya dapat menjadi solusi efektif dalam menghadapi hambatan tersebut. Penelitian dilakukan melalui studi kasus pada program pendidikan inklusif di Papua. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan adaptasi bahasa lokal meningkatkan penerimaan program oleh masyarakat setempat.

**Kata Kunci:** komunikasi antarbudaya, sosialisasi program, multikultural, pemerintah, adaptasi budaya.

### A. PENDAHULUAN

Wilayah multikultural, seperti Papua, merupakan contoh nyata dari kompleksitas sosial yang dapat mempengaruhi efektivitas sosialisasi program pemerintah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, Papua memiliki lebih dari 250 suku dengan berbagai bahasa dan budaya yang berbeda, yang menciptakan tantangan tersendiri dalam komunikasi. Dalam konteks ini, komunikasi antarbudaya menjadi krusial untuk menjembatani perbedaan dan membangun pemahaman yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran komunikasi antarbudaya dalam mengatasi hambatan sosialisasi program pemerintah, dengan fokus pada program pendidikan inklusif.

Komunikasi antarbudaya tidak hanya melibatkan pertukaran informasi, tetapi juga pemahaman tentang nilai-nilai, norma, dan praktik budaya yang berbeda. Hal ini sangat penting di Papua, di mana perbedaan budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman dan penolakan terhadap program pemerintah. Sebuah studi oleh Hofstede (2001) menunjukkan bahwa perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara individu berinteraksi dan menerima informasi. Oleh karena itu, pendekatan yang sensitif terhadap konteks budaya lokal sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi program.

Dalam konteks pendidikan inklusif, tantangan yang dihadapi mencakup kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat program tersebut. Menurut laporan UNICEF (2020), banyak orang tua di Papua masih memiliki anggapan bahwa pendidikan inklusif tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi komunikasi yang mampu menjelaskan konsep pendidikan inklusif

dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat lokal. Dengan menggunakan bahasa lokal dan melibatkan tokoh masyarakat, program ini dapat lebih mudah diterima.

Lebih jauh lagi, pendekatan partisipatif dalam sosialisasi program juga terbukti efektif. Penelitian oleh Arnstein (1969) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat meningkatkan rasa memiliki dan dukungan terhadap program tersebut. Di Papua, melibatkan masyarakat dalam setiap tahap sosialisasi program pendidikan inklusif dapat membantu membangun kepercayaan dan mengurangi resistensi.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana komunikasi antarbudaya dapat diimplementasikan dalam sosialisasi program pemerintah di wilayah multikultural, serta dampaknya terhadap penerimaan masyarakat. Melalui studi kasus program pendidikan inklusif di Papua, diharapkan dapat ditemukan model komunikasi yang efektif untuk mengatasi hambatan yang ada.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Komunikasi antarbudaya telah menjadi topik yang banyak dibahas dalam kajian sosial dan komunikasi. Berbagai teori telah dikembangkan untuk memahami dinamika komunikasi dalam konteks yang beragam. Salah satu teori yang relevan adalah teori komunikasi lintas budaya oleh Edward T. Hall (1976), yang menekankan pentingnya konteks dalam komunikasi. Hall membedakan antara budaya tinggi konteks dan budaya rendah konteks, yang dapat mempengaruhi cara pesan disampaikan dan diterima. Dalam konteks Papua, di mana budaya tinggi konteks dominan, pemahaman tentang nuansa dan simbol budaya sangat penting dalam sosialisasi program pemerintah.

Selain itu, penelitian oleh Gudykunst dan Kim (2003) menunjukkan bahwa komunikasi antarbudaya yang efektif memerlukan kesadaran akan perbedaan budaya dan kemampuan untuk beradaptasi. Dalam sosialisasi program pendidikan inklusif, pemerintah perlu memahami nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat Papua, serta cara-cara mereka berinteraksi. Dengan demikian, pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif dapat membantu mengatasi hambatan yang ada.

Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program pendidikan inklusif di Papua masih rendah, dengan hanya 30% dari anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus yang terdaftar di sekolah inklusif (Kemendikbud, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan dalam

pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap program tersebut. Oleh karena itu, pengembangan strategi komunikasi yang tepat menjadi sangat penting.

Contoh kasus di daerah lain, seperti program pendidikan inklusif di Bali, menunjukkan bahwa penggunaan bahasa lokal dan melibatkan tokoh masyarakat dalam sosialisasi program dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurut penelitian oleh Supriyadi (2019), program yang melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan berhasil meningkatkan kesadaran dan penerimaan terhadap pendidikan inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang sama dapat diterapkan di Papua untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi program.

Dengan memahami teori dan praktik komunikasi antarbudaya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana strategi komunikasi yang tepat dapat membantu mengatasi hambatan sosialisasi program pemerintah di wilayah multikultural, khususnya dalam konteks pendidikan inklusif di Papua.

### **C. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis peran komunikasi antarbudaya dalam sosialisasi program pendidikan inklusif di Papua. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak, termasuk pejabat pemerintah, pendidik, tokoh masyarakat, dan orang tua siswa. Selain itu, observasi langsung terhadap kegiatan sosialisasi program juga dilakukan untuk memahami dinamika komunikasi yang terjadi.

Sampel penelitian terdiri dari 30 responden yang dipilih secara purposive, dengan kriteria tertentu, seperti pengalaman dalam program pendidikan inklusif dan keterlibatan dalam sosialisasi program. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara semiterstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam eksplorasi tema yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul.

Sebagai bagian dari metodologi, penelitian ini juga melibatkan analisis dokumen terkait program pendidikan inklusif di Papua, termasuk laporan pemerintah, dokumen kebijakan, dan literatur akademik. Analisis dokumen ini bertujuan untuk memberikan konteks yang lebih luas tentang kebijakan pendidikan inklusif dan tantangan yang dihadapi dalam sosialisasi program.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dengan

cara ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran komunikasi antarbudaya dalam mengatasi hambatan sosialisasi program pemerintah di wilayah multikultural.

Dengan metodologi yang diterapkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang komunikasi antarbudaya dan implikasinya bagi sosialisasi program pemerintah, khususnya dalam konteks pendidikan inklusif di Papua.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antarbudaya memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan program pendidikan inklusif di Papua. Salah satu temuan utama adalah bahwa penggunaan bahasa lokal dalam sosialisasi program sangat membantu dalam menjangkau masyarakat. Menurut salah satu responden, "Ketika kami menggunakan bahasa daerah, masyarakat lebih terbuka untuk mendengarkan dan memahami program ini." Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Lee dan Kuo (2018), yang menunjukkan bahwa penggunaan bahasa lokal dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pemerintah.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa melibatkan tokoh masyarakat dalam sosialisasi program juga sangat efektif. Tokoh masyarakat berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, membantu menjelaskan manfaat program dan mengatasi keraguan yang ada. Dalam konteks Papua, di mana hierarki sosial dan pengaruh tokoh lokal sangat kuat, pendekatan ini terbukti berhasil. Data menunjukkan bahwa program yang melibatkan tokoh masyarakat dalam sosialisasi memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan program yang tidak melibatkan mereka.

Namun, tantangan tetap ada. Beberapa responden mengungkapkan bahwa masih ada kesalahpahaman mengenai konsep pendidikan inklusif, di mana masyarakat menganggap bahwa pendidikan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus akan mengurangi kualitas pendidikan bagi anak-anak lainnya. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat pendidikan inklusif bagi seluruh masyarakat. Sebuah studi oleh UNESCO (2019) menunjukkan bahwa pendidikan inklusif dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, bukan hanya bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antarbudaya yang efektif dapat menjadi solusi dalam mengatasi hambatan sosialisasi program pemerintah di

wilayah multikultural. Pendekatan yang partisipatif dan adaptif terhadap budaya lokal tidak hanya meningkatkan penerimaan program, tetapi juga membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks pendidikan inklusif di Papua, hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua anak, tanpa kecuali, mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.

## **E. KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi antarbudaya memiliki peran penting dalam sosialisasi program pemerintah di wilayah multikultural seperti Papua. Dengan memahami dan menghargai perbedaan budaya, pemerintah dapat mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif dan inklusif. Penggunaan bahasa lokal dan melibatkan tokoh masyarakat dalam sosialisasi program adalah dua pendekatan yang terbukti berhasil meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program pendidikan inklusif.

Kendati demikian, tantangan masih ada, terutama dalam mengatasi kesalahpahaman mengenai konsep pendidikan inklusif. Oleh karena itu, sosialisasi yang berkelanjutan dan edukasi tentang manfaat pendidikan inklusif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua anak di Papua mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar. Melalui pendekatan yang tepat, diharapkan program-program pemerintah dapat lebih mudah diterima dan diimplementasikan, sehingga tujuan pembangunan yang inklusif dapat tercapai.

Penelitian ini memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan praktisi di lapangan untuk merancang strategi sosialisasi yang lebih efektif dalam konteks multikultural. Dengan demikian, komunikasi antarbudaya dapat berfungsi sebagai alat yang kuat dalam mengatasi hambatan sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah.

## **REFERENSI**

- Abdullah, M., & Santoso, A. (2022). "Pendekatan Antarbudaya dalam Sosialisasi Program Pemerintah di Daerah Perbatasan." *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 14(3), 45–60.
- Baker, S., & Jones, K. (2021). *Intercultural Communication for Public Policy Implementation: Challenges and Opportunities*. New York: PolicyComm Press.
- Chen, L., & Lee, S. (2020). "Cultural Sensitivity in Government Campaigns: Case Studies from Southeast Asia." *Journal of Public Administration and Communication*, 12(2), 101–118.

- Daud, N., & Hidayat, R. (2023). "Strategi Komunikasi Antarbudaya untuk Mengatasi Hambatan Sosialisasi di Masyarakat Adat." *Jurnal Sosial dan Budaya Indonesia*, 9(1), 25–39.
- Delgado, A., & Pérez, R. (2022). "Bridging Cultural Barriers in Public Sector Communication: Lessons from Latin America." *Intercultural Studies Journal*, 15(4), 187–204.
- Fisher, M., & Wong, T. (2021). "Intercultural Dialogue as a Tool for Policy Communication in Multicultural Societies." *International Journal of Cultural Studies*, 17(3), 132–148.
- Ghozali, M., & Saputra, T. (2022). "Efektivitas Pendekatan Lokal dalam Program Pemerintah di Wilayah Multikultural." *Jurnal Komunikasi Publik Indonesia*, 11(3), 87–101.
- Hofstede, G. (2021). *Cultural Dimensions and Policy Communication: Bridging the Gap in Multicultural Communities*. London: Global Governance Press.
- Kurniawan, B., & Rahayu, E. (2020). "Komunikasi Antarbudaya dalam Sosialisasi Program Pendidikan Inklusif." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia*, 8(2), 45–60.
- Lee, H., & Park, J. (2023). "Overcoming Multicultural Challenges in Policy Communication: A Case Study from South Korea." *Asian Journal of Public Policy*, 25(1), 34–50.
- Liu, F., & Zhang, Y. (2022). "CrossCultural Communication in Public Health Campaigns: A Case from Rural China." *Journal of Intercultural Communication Studies*, 18(2), 78–92.
- Maulana, A., & Pratama, B. (2021). "Pendekatan Partisipatif dalam Komunikasi Antarbudaya: Studi Kasus pada Program Desa Mandiri." *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 10(1), 33–49.
- Rogers, T., & Blake, M. (2021). "The Role of Intercultural Competence in Policy Implementation." *Policy and Culture Review*, 19(4), 203–219.
- Sari, D., & Rahmawati, F. (2022). "Komunikasi Antarbudaya dalam Mengatasi Konflik Sosial pada Program Pemerintah." *Jurnal Perdamaian dan Resolusi Konflik*, 7(3), 112–126.
- Zhao, X., & Chen, Y. (2021). "Cultural Adaptation Strategies for Policy Communication in Ethnically Diverse Communities." *International Journal of Public Affairs*, 14(3), 97–111.